

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN
SEGMENTASI KUALIFIKASI USAHA UNTUK PAKET
PEKERJAAN YANG MENUNTUT KEMAMPUAN
TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**



Diajukan oleh:

Juwita Putri

NIM 2220215320002

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN SEGMENTASI
KUALIFIKASI USAHA UNTUK PAKET PEKERJAAN YANG
MENUNTUT KEMAMPUAN TEKNIS DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

JUWITA PUTRI

NIM 2220215320002

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN
SEGMENTASI KUALIFIKASI USAHA UNTUK PAKET
PEKERJAAN YANG MENUNTUT KEMAMPUAN TEKNIS
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Nama : Juwita Putri
NIM : 2220215320002

Disetujui,

PEMBIMBING



Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP.

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DI SETUJUI
PADA TANGGAL.....

PEMBIMBING



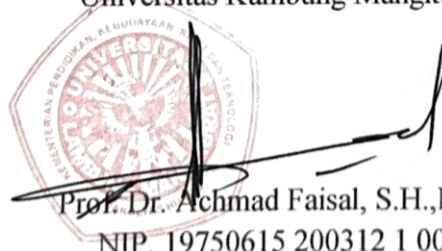
Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP.

Disahkan Oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum



Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwita Putri
NIM : 2220215320002
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Juwita Putri
NIM. 2220215320002

PUTRI, JUWITA. 2024. Kepastian Hukum Dalam Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha Untuk Paket Pekerjaan Yang Menuntut Kemampuan Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. ICHSAN ANWARI, S.H., M.H.**, 108 halaman.

RINGKASAN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dihapuskan atau digantikan dengan peraturan terbaru. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat 4, “Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 ,dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.”, kemudian diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 65 ayat 4 “Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 diperuntukan bagi usaha kecil dan /atau koperasi. Dan ayat 5 “Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.” Ternyata menjadi polemik ketika disandingkan dengan keadaan di lapangan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan dimana ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis telah dicabut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan segmentasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Presedin tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu kriteria untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pun tidak serta merta dapat dikerjakan oleh usaha kecil hanya karena berdasarkan batas nilai pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Namun dikarenakan aturan yang terdahulu telah dicabut lalu menjadi kekosongan hukum bagi kita orang awam yang membacanya, padahal secara tegas pada aturan terbaru tetap menyebutkan beberapa aturan terdahulu masih dapat diterapkan selama tidak bertentangan.

Dengan adanya kekosongan hukum ini menjadi celah bagi mereka yaitu usaha kecil yang disebutkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut untuk terus membuat aduan dikarenakan ketidaksetujuan terhadap penetapan kualifikasi usaha yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan.

PUTRI, JUWITA. 2024. Kepastian Hukum Dalam Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha Untuk Paket Pekerjaan Yang Menuntut Kemampuan Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. ICHSAN ANWARI, S.H., M.H.**, 108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kualifikasi Usaha; Pengadaan Barang Jasa; Pemerintah

Kepastian hukum dalam menentukan kualifikasi perusahaan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis sangat penting. Ini karena peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengandung persyaratan kualifikasi yang spesifik yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menawar barang/jasa. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat kualifikasi ini, mereka tidak dianggap sebagai penyedia barang/jasa yang layak dan tidak akan memenangkan kontrak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa syarat-syarat kualifikasi yang mereka tetapkan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses penilaian kualifikasi transparan dan adil, dan bahwa semua penyedia barang/jasa yang menawar barang/jasa memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Sifat penelitian secara prespektif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adanya kekosongan hukum mengenai pengertian kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menuangkan pengertian kemampuan teknis didalam penjelasan pasalnya telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal tidak adanya pengertian kemampuan teknis di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang terkini, tidak menghapuskan pengertian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengganti peraturan yang ada.

PUTRI, JUWITA. 2024. Legal Certainty in Determining Business Qualification Segmentation for Work Packages Requiring Technical Skills in Government Procurement of Goods/Services. Master of Law Program, faculty of law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. ICHSAN ANWARI, S.H., M.H., 108 page.

ABSTRACT

Keywords: *Business Qualification; Procurement Goods and Services; Government*

Legal certainty in determining company qualifications in government procurement regulations for projects that require technical expertise is crucial. This is because government procurement regulations often include specific qualification requirements that must be met by companies bidding for goods/services. If a company fails to meet these qualification criteria, they are not considered eligible providers and will not win the contract. Therefore, it is important for the government to ensure that the qualification criteria they set are fair and non-discriminatory. Additionally, it is crucial for the government to ensure that the qualification assessment process is transparent and fair, and that all providers bidding for goods/services have an equal opportunity to meet the qualification criteria.

The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research is analytical prospective, where the research is conducted by studying the legal objectives, principles of justice, validity of legal rules, legal concepts, and legal norms. The approach used in this legal research is legislative approach, conceptual approach, and case approach.

The absence of legal provisions regarding the definition of technical capability in government procurement of goods/services is due to Presidential Regulation Number 70 of 2012, which embedded the definition of technical capability in its article explanation but was revoked by Presidential Regulation Number 16 of 2018. The lack of a current legal definition of technical capability in legislation on procurement of goods/services does not nullify the definition previously stipulated in earlier legislation because there has been no legislation replacing the existing regulations.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan anugerahNya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kepastian Hukum Dalam Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha Untuk Paket Pekerjaan Yang Menuntut Kemampuan Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Shalawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan atas setiap perbuatan, bicara dan diamnya kita umat Islam.

Penulis menyadari dalam penelitian tesis ini banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, hal tersebut disebabkan karena ketrebatasan kemampuan berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karenanya penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut dan mengharapkan masukan berypa

kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak agar bisa memperbaiki segala kekurangan di masa sekarang dan tentunya di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan doa dan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Erwansyah Jafar, SE dan Rusinah Winanti, serta kedua adik penulis, Yusuf Iqbal dan Ajie Firdaus dan seluruh keluarga yang selalu memanjatkan doa serta memberikan semangat yang tiada henti untuk penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta Wakil-Wakil Dekan dan seluruh staf administrasi, tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman selama kuliah hingga menyelesaikan tesis ini dan yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ichsan Anwari, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang penuh ketulusan, kesabaran, ketekunan, dan penuh tanggungjawab telah berkenan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H selaku Tim Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan masukan, pengarahan, dan kritikan guna kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Para dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada penulis.
6. Pimpinan dan para rekan kerja di Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang selalu memberi dukungan dan saran dalam membantu penulisan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2022, yang telah memberikan motivasi dan dukungan, serta kolega dalam berdiskusi sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin ya Rabb.

Banjarmasin, Oktober 2024

Penulis,

Juwita Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	52
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	57
BAB II	59
PENENTUAN SEGMENTASI KUALIFIKASI USAHA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	59
A. Penentuan Kualifikasi Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja	59
B. Penentuan Kualifikasi Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	70
BAB III	80
A. Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang Menuntut Kemampuan Teknis	80
B. Kepastian Hukum Dalam Menentukan Kualifikasi Usaha Pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Paket Pekerjaan Yang Menuntut Kemampuan Teknis	102
BAB IV	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Metode Pemilihan Penyedia	42
Tabel 2. Perbedaan UMK dan Non UMK Berdasarkan Pembagian Modal Usaha	63
Tabel 3. Perbedaan UMK dan Non UMK Berdasarkan Pembagian Modal Usaha	67
Tabel 4. Perbedaan Penentuan Kualifikasi Usaha	74
Tabel 5. Kriteria Perusahaan untuk Pekerjaan yang Menuntut Kemampuan Teknis	99